Resume Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Nama : Supriadi

Nim. : 10200120162

Kelas : HTN.D

Materi 1: Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu Lainnya

Hubungan Hukum Tata Negara (HTN) Dengan Ilmu-Ilmu Lainnya

1. Ilmu Negara

Ilmu negara memberikan dasar-dasar teoritis kepada HTN positif, sedangkan HTN merupakan kongkretisasi dari teori-teori Ilmu Negara

2. Ilmu Politik

Hubungan HTN dengan Ilmu Politik pertama kali dikemukakan oleh J. Barent di dalam bukunya *De Wetenschap der Politiek*. Hubungan ini diungkapkan dengan suatu perumpamaan : *het vlees omhet geraamte van de staat*. Artinya bahwa HTN sebagai kerangka manusia, sedangkan Ilmu politik sebagai daging yang melekat disekitarnya.

3. Hukum Administrasi Negara (HAN)

Van Vollenhoven dalam bukunya *Omtreck van het Administratiefrecht* mengemukakan bahwa badan-badan Negara tanpa HTN akan lumpuh bagaikan tanpa sayap, karena badan-badan Negara itu tidak memiliki wewenang. Sebaliknya, apabila badan-badan Negara tanpa adanya HAN menjadi bebas tanpa batas, sebab dapat berbuat menurut kehendaknya.

4. Hukum Internasional

C. Parry dalam bukunya, *“Manual of Public International Law”* (dikutip oleh Wade and Phillips) mengatakan bahwa: HI berkaitan dengan hubungan luar negeri suatu Negara dengan Negara-negara lain. HTN mengatur hubungan Negara dengan warga negaranya dan pihak-pihak lain di dalam wilayah Negara.

Materi 2: Sumber-Sumber Hukum Tata Negara

Sumber hukum tata negara Indonesia mencakup sumber hukum dalam arti materiil dan sumber dalam arti formil. Sumber hukum materiil tata negara adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara, dan contoh sumber hukum yang termasuk dalam arti materiil yaitu Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara.

Sumber hukum dalam arti formil diantaranya :

- Hukum perundang-undangan ketatanegaraan
- Hukum adat ketatanegaraan
- Hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan
- Yurisprudensi ketatanegaraan (Putusan hakim TUN)
- Hukum perjanjian internasional ketatanegaraan (Traktat)
- Doktrin ketatanegaraan (Pendapat ahli Hukum tata negara).

Sumber hukum formil:

1. Undang-undang dasar 1945

Undang-undang dasar 1945 merupakan segala induk dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang dibuat ,tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

2. Ketetapan MPR

Istilah ketetapan MPR tidak terdapat dalam UUD 1945, namun berdasarkan surat Presiden yang ditujukan kepada DPR no.2262/HK/1959 tanggal 20 Agustus 1959, dikenal bentuk peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Keputusan MPRS yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan pasal 2 UUD 1945.

3. Undang-undang/ PERPU

Undang-undang pada dasarnya memiliki arti secara formil dan materiil. Undang-undang dalam arti formil adalah suatu bentuk keputusan atau

ketentuan yang dikeluarkan oleh pembentuk Undang-undang dengan prosedur tertentu.

Undang-undang dalam arti materiil adalah Setiap bentuk keputusan pemerintah yang mempunyai kekuatan mengikat tanpa memperhatikan prosedur pembuatannya dan tata cara serta lembaga yang membuatnya. Dasar dari pembuatan Undang-undang ialah Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) UUD 1945.

4. Peraturan pemerintah (PP)

Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Presiden tidak akan menetapkan peraturan pemerintah tersebut sebelum ada Undang-undangnya, mengingat bahwa Undang-undang tersebut merupakan sumber hukum tata negara, maka Peraturan pemerintah tersebut juga merupakan sumber hukum tata negara.

5. Keputusan Presiden

Keputusan Presiden pertama kalinya dikenal sebagai bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan surat Presiden yang ditujukan kepada DPR tertanggal 20 Agustus 1959 No.2262/HK/1959. Keputusan Presiden tersebut dimasukkan kedalam peraturan perundang-undangan guna melaksanakan peraturan Presiden maupun Undang-undang dibidang pengangkatan dan pemberhentian baik personalia, pegawai atau anggota DPR.

7. Konvensi

Konvensi sama dengan kebiasaan ketatanegaraan dengan adanya keyakinan hukum dari golongan atau orang-orang yang berkepentingan dan keyakinan tersebut dipercaya memuat hal-hal yang baik dan karena adanya nilai-nilai yang baik dalam aturan tersebut maka harus ditaati.

8. Traktat

Traktat ketatanegaraan tidak sama persis dengan perjanjian, namun ada kemiripan karena traktat tersebut merupakan suatu perjanjian, hanya saja prosesnya berbeda dengan perjanjian pada umumnya.

Materi 3 : Asas-Asas Hukum Tata Negara

Asas Hukum Tata Negara

1. Asas Pancasila

Asas pancasila adalah sumber hukum materil karena itu setiap pengaturan isi peraturan perundangan tidak boleh bertentangan pada Pancasila dan bila terjadi maka peraturan tersebut harus segera dicabut.

Pancasila sebagai asas Hukum Tata Negara bisa dilihat dari:

- > Asas Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila Ke-1).
- > Asas Prikemanusiaan (Sila Ke-2).
- > Asas Kebangsaan (Sila Ke-3).
- > Asas Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4)
- > Asas keadilan (Sila Ke-5)
- > Asas Kedaulatan Rakyat

Dalam Hukum Tata Negara pengertian kedaulatan bisa relatif, maksudnya bahwa kedaulatan itu tidak hanya dikenal pada negara-negara yang memiliki kekuasaan penuh keluar dan kedalam tapi juga dapat dikenakan kepada negara-negara yang berhubungan pada sebuah perjanjian yang berbentuk traktat atau dalam bentuk konfederasi atau federasi. kedaulatan tersebut tidak terpecah-pecah karena dalam suatu negara hanya ada satu kekuasaan yang tertinggi.

Kedaulatan rakyat adalah bahwa rakyatlah yang memiliki wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang dalam negara kedaulatan rakyat diwakilkan pada MPR, kekuasaan majelis itu nyata dan ditentukan oleh UUD tapi oleh karena majelis merupakan sebuah badan yang besar dan lamban sifatnya maka ia menyerahkan lagi kepada badan-badan yang ada dibawahnya.

2. Asas Negara Hukum

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan pada warga Negaranya. Keadilan adalah syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan perlu di ajarkan rasa susila pada setiap manusia supaya dia menjadi warga Negara yang baik.

Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada bila peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

3. Asas Pembagian Kekuasaan

Pengertian pembagian kekuasaan beda dari pengertian pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan artinya bahwa kekuasaan Negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya ataupun fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa sebuah pemisahan kekuasaan murni tidak bisa dilaksanakan. Karena itu pilihan jatuh kepada istilah pembagian kekuasaan yang artinya bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, namun tidak dipisahkan. Hal membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian tersebut dimungkinkan adanya kerjasama.

4. Asas Negara Kesatuan

Salah satu cara untuk menjaga keutuhan negara ini yakni dengan membentuk hukum tata negara yang bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terkandung dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (1) sudah ditegaskan bahwa Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Setiap hukum tata negara yang hendak dibentuk harus memperhatikan pada hal ini.

Tidak dibenarkan adanya materi di dalam hukum tata negara yang mempunyai peluang untuk memecah belah bangsa ini. Oleh sebab itu, salah satu tahapan kebijakan publik adalah menguji kebijakan publik, semata untuk mencegah supaya kebijakan publik tersebut berpotensi menjadi penyebab konflik sosial.

Faktor-Faktor Utama dalam Ketatanegaraan

Ada tiga faktor utama dalam hal ketatanegaraan menurut Solly Lubis (1982: 15), yaitu: (a). Faktor filsafat negara, (b). Faktor konstitusi dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan (c). Faktor garis politik, yang satu sama lain sangat erat hubungannya dan tidak dapat dipisahkan baik dalam teori maupun praktek.

Faktor filsafat, ialah dasar filsafat negara yang disebut juga dasar atau landasan idiil. Dasar filsafat ini berakar pada pandangan hidup

masyarakat yang mendukung negara itu, misalnya: Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang berakar pada pandangan hidup termasuk cita-cita ketatanegaraan, yang terbentuk dari watak dan kepribadian bangsa Indonesia.

Faktor konstitusi atau UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ialah ketentuan hukum mengenai struktur negara dan pemerintahannya, termasuk bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya, tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungannya satu sama lain.

Materi 4 : Sejarah Ketatanegaraan Indonesia

Sampai saat ini belum ada pendapat/pandangan ahli/pakar yg disepakati mengenai pengertian asas hukum. Satu hal yg menjadi kendala dalam menyamakan pendapat adalah karena latarbelakang para ahli yg berbeda-beda. Ahli yg berlatarbelakang sosiologi hukum akan merumuskan pengertian asas hukum sesuai dgn kompetensinya, begitupun dgn pakar yg berlatarbelakang sejarah, dll.

Harusnya telah diterapkan, karena sudah menjadi perintah konstitusi. Penilaian terhadap penerapan pasal a quo tentu akan berbeda-beda dan sangat tergantung dari aspek mana. Misalnya dari aspek perundang-undangan, khususnya dalam pembentukan UU Cipta Kerja, menurut sy tidak mencerminkan penerapan pasal tersebut, karena pemerintah dan DPR mengabaikan gelombang protes sebagai wujud ketidaksetujuan terhadap RUU tersebut. Padahal pembentukan UU harus sesuai dgn keinginan masyarakat. Tetapi dari aspek lain, mungkin org akan berpandangan bhw pasal aquo telah diimplementasikan.

Jika kita meneliti aspek-aspek tertentu, akan sangat memungkinkan kita menemukan kondisi dimana akan disimpulkan bhw pasal aquo blm terimplementasi, misalnya penerapan pasal 33 dan pasal2 lain dlm UUD. Blm lagi pandangan dari org-org/pihak-pihak yg secara langsung merasa dirugikan secara konstitusional oleh kebijakan pemerintah.

Jika penyelenggara negara betul-betul menyadari lalu kemudian menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka sangat kecil peluang terjadinya penyimpangan dlm proses penyelenggaraan negara. Praktik-praktik koruptif tdk akan terjadi jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan.

Hukum positif wajib merujuk pada asas-asas hukum yg berlaku, pembentukan hukum positif (peraturan perundang-undangan) yg

bertentangan dengan asas harus dicabut, apalagi jika misalnya bertentangan dgn asas Pancasila atau asas negara hukum, dst.

Oleh karena sifat dari asas hukum itu tdk konkrit, maka asas hukum tdk secara langsung mengatur mengenai sanksi, tetapi pengaturan sanksi bagi penyelenggara negara yg tdk taat asas diatur dlm norma hukum.

Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan berhak untuk mengoreksi setiap tindakan pemerintahan yg lakukan oleh penyelenggara negara. Sarana-sarana konstitusional untuk menguji setiap kebijakan/tindakan pemerintah telah tersedia untuk hal itu, meskipun terkadang sarana tersebut tdk efektif. Tetapi kita tdk boleh pesimis dan tetap harus berikhtiar untuk mengawal dan terus mengingatkan para wakil rakyat baik dilegislatif, eksekutif dan yudikatif untuk terus berbenah.

pada prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan pedoman awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani kita ambil contoh di Indonesia hakimnya itu tidak terikat untuk melaksanakan yurisprudensi karena mengapa, Yurisprudensi hanya dianggap sebagai pedoman atau arahan untuk memutus suatu perkara. Oleh karena itu Apabila terdapat pertentangan antara hukum yang ada dengan yurisprudensi, yang berlaku ialah hukum.

Maka dari itu kebolehan hakim untuk menghukum seseorang tanpa adanya dasar hukum bukan karena yurisprudensi, melainkan karena hal tersebut adalah prinsip dari kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan.

Korupsi sebagai extra ordinary crime tentu membutuhkan upaya-upaya yg luar biasa dan keterlibatan seluruh elemen termasuk masyarakat. Pemberantasan Korupsi tdk akan berhasil jika hanya dilakukan dgn cara yg biasa-biasa saja.

Apalagi saat ini, perilaku koruptif tdk hanya terjadi pada level pemerintah pusat, tetapi sdh sampai pada level pemerintah paling bawah.

Political will pemerintah, kesungguhan aparat penegak hukum, dan peran serta masyarakat harus seirama, karena ketiganya memiliki peran yg sangat vital.

Membangun sistem yg kuat tanpa disertai dgn aparatur/penyelenggara yg berintegritas tetap tdk akan berhasil. Buktinya pelbagai inovasi

pelayanan telah dilakukan, tetap praktik suap/gratifikasi tetap terjadi karena sistem dijalankan oleh aparat/penyelenggara yg tdk berintegritas.

Sikap permisif masyarakat dan bahkan cenderung menganggap hal biasa dlm memberikan uang capek dlm proses pemberian layanan publik pastinya akan semakin melestarikan perilaku korupsi.

Jika menggunakan teori sistem hukum dari Friedman, maka ketiganya harus bersinergi dan satu komando.

Seseorang dapat menerapkan meskipun tidak ada peraturan yang melarang perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Namun, kemungkinan tersebut bukan karena yurisprudensi.

Asas legalitas perjanjian dalam ranah hukum pidana dan terkenal dengan adagium legendaris von Feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Secara bebas, adagium tersebut dapat diartikan menjadi “tidak ada tindak pidana (delik), tidak ada peraturan yang mendahuluinya”. Secara umum, pembagian kelompok adagium tersebut menjadi tiga bagian, yaitu:

- 1) tidak ada larangan, kalau tak ada Undang-undang,
- 2) Tidak ada hukum, kalau tak ada kejahatan
- 3) Tidak ada kejahatan, kalau tidak ada undang, yang berdasarkan Undang-undang.

Adagium tersebut merupakan dasar dari asas bahwa ketentuan pidana tidak dapat diandalkan (asas non-retroaktif) karena suatu delik hanya dapat dikatakan sebagai kejahatan telah ada aturan sebelumnya yang melarang delik untuk dilakukan, bukan sesudah delik tersebut dilakukan.

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak sama seperti sistem hukum Anglo-Saxon yang menganut aliran *freie rechtslehre* yang memperbolehkan hakim untuk menciptakan hukum. Sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang perkiraan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesië* (“AB”) yang menyatakan bahwa hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang. Namun demikian, hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.

Pada beberapa kesempatan, hakim akan dihadapkan kepada keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar hukum atau pengaturan hukumnya tidak jelas. Dalam keadaan ini, hakim tidak menolak untuk mengadili perkara tersebut dengan dalih tidak ada hukum yang berbicara.

Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") yang berbunyi:

" Pengadilan dilarang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ."

Juga dengan Pasal 5 ayat (1) UU 48/2009 yang berbunyi:

" Hakim dan hakim konstitusi wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ."

Selain dua ketentuan tersebut, Pasal 22 AB juga menyatakan bahwa hakim menolak untuk mengadili dengan alasan undang-undangnya bungkam, tidak jelas atau tidak lengkap, dapat dituntut karena menolak untuk mengadili.

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim harus mendasarkan putusannya dalam mengadili kepada peraturan perundang-undangan dan bebas untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hukum tersebut. Meskipun demikian, dalam hal perkara yang diadili tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim pun tetap wajib untuk mengadili perkara tersebut. Sehingga prinsipnya, asas legalitas harus dijadikan baru awal bagi hakim untuk mengadili kasus yang sedang mereka tangani.

Dalam hal putusan tersebut berlangsung sekian lama dan diputus oleh pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung), maka putusan tersebut dapat menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum formal selain undang-undang, kebiasaan, dan traktat.

Kalau bicara sumber hukum, khususnya dinegara-negara eropa kontinental, maka hukum positif menjadi salah satu sumber hukum yg utama. Tetapi jika yg dibandingkan antara asas hukum dan norma hukum, maka kedudukan asas hukum lebih tinggi norma hukum, karena dalam pembentukannya norma hukum wajib merujuk pada asas-asas hukum yg berlaku.

Seseorang dapat dihukum meskipun tidak ada peraturan yang mengatur larangan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Namun, kemungkinan tersebut bukan karena yurisprudensi.

Hakim di Indonesia tidak terikat untuk melaksanakan yurisprudensi. Yurisprudensi hanya dianggap sebagai pedoman atau arahan untuk memutus suatu perkara. Apabila terdapat pertentangan antara hukum yang ada dengan yurisprudensi, yang berlaku adalah hukum.

Dengan demikian, harus dicermati bahwa kebolehan hakim untuk menghukum seseorang tanpa adanya dasar hukum bukan karena yurisprudensi, melainkan karena hal tersebut adalah prinsip dari kekuasaan kehakiman untuk mencari keadilan.

Secara substansi, potensi terjadinya pertentangan antara putusan hakim (yurisprudensi) dengan hukum tertulis sangat mungkin terjadi.

Dalam kondisi tertentu, hakim dapat menyimpangi peraturan perundang-undangan dengan dasar Kemandirian dan kewajiban Hakim dalam menggali nilai-nilai yg hidup ditengah masyarakat.

Apalagi hukum tertulis biasanya akan lambat mengikuti perkembangan zaman, sehingga hakim akan sulit untuk memberikan keadilan dlm putusannya. sementara tuntutan pencari keadilan tdk boleh diabaikan hanya karena aturannya yang sdh tidak relevan.

Materi 5: Konstitui Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara

Konvensi yang ada di Indonesia mempunyai kedudukan yang penting, hal ini dapat dilihat Setelah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia merupakan negara yang merdeka. Sehari setelah kemerdekaan tersebut, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan pula Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis Negara Republik Indonesia. Berlakunya UUD 1945 sebagai Konstitusi di Indonesia terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap pertama 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, kemudian tahap kedua sejak Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sejak ditetapkannya UUD 1945 sebagai norma hukum dasar tertinggi, hingga saat ini tentunya telah banyak pula Konvensi Ketatanegaraan yang

dilakukan dalam praktek penyelenggaraan Indonesia baik Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kebiasaan ketatanegaraan (custom) maupun Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan (agreement). Periode Orde Baru, sejak tahun 1966 terdapat beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat dipandang sebagai konvensi yang sifatnya melengkapi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Contoh konvensi-konvensi yang pernah timbul dan konvensi yang tetap terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara Indonesia.

Pemberantasan korupsi juga harus sesuai dengan konstitusi karena kalau tidak maka akan mengacau sistem ketatanegaraan. Mengingatkan para pihak yang dituduh korupsi untuk bisa memperjuangkan hak mereka sesuai konstitusi. Dalam hukum ketatanegaraan, seseorang hanya bisa dijerat dengan kasus korupsi hanya jika korupsi yang dimaksud sesuai dengan constitutional intent atau makna konstitusi.

KONSTITUSI dalam sebuah negara secara umum disepakati sebagai aturan dasar yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aturan-aturan hukum tercakup di dalamnya, termasuk aturan yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi.

Meski tidak disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi, kejahatan korupsi tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ungkapan itu menunjukkan secara tersirat, jika tidak segera diantisipasi, kejahatan korupsi, meski tidak secara langsung, berdampak luar biasa bagi maju-mundurnya atau bahkan runtuh-tegaknya negara

Sebagai rujukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, konstitusi perlu hadir dan hidup dalam tingkah laku keseharian segenap warga negara (the living constitution). Dengan kata lain, tanpa bermaksud mengabaikan faktor struktur hukum dan substansi hukum, sasaran yang dimaksud yakni bagaimana merekonstruksi budaya hukum masyarakat sebagai pilihan mencegah dan memberantas korupsi. Hal itu berarti bagaimana menjadikan konstitusi sebagai praktik nyata kehidupan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi.

Apabila suatu negara tidak menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum berarti negara tersebut tidak memiliki landasan dan tidak memiliki aturan. Tentunya apabila tidak ada aturan atau landasan maka sebuah negara akan berantakan karena seluruh masyarakat tentu berbuat sesuai keegoisan masing-masing.

Pemberantasan kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan cara :

1) pembiasaan dan penciptaan; 2) internalisasi pendidikan; 3) komitmen bersama dalam ikatan kelompok.

Secara lebih sederhana, dalam proses pembiasaan dan penciptaan, pembudayaan konstitusi dalam mendongkel kejahatan korupsi dapat dilakukan melalui laku hidup keseharian dan dalam lingkup ruang terkecil, yakni keluarga dan lingkungan tempat tinggal sekitar. Perlu dibentuk ruang-ruang diskursus sederhana agar tercipta proses fasilitasi kesadaran berkonstitusi. Pesan yang ingin disampaikan tak lain bahwa wabah korupsi dapat menjauhkan negara dari cita-cita konstitusionalnya

Sebelumnya kita tahu bahwa dalam hal itu konstitusi ialah UU, nah UU itu hukum dasar negara Indonesia. Ketika adanya sebuah kasus korupsi dia sangat berperan penting ketika konstitusi itu untuk mengatasi kasus itu yang dimana dia sebagai sumber dan landasan hukum yang terjadi tindak pidana korupsi.

Tindakan sewenang-wenang itu adalah tindakan yang tidak didasarkan pada kewenangan yang sah. Contohnya, Polisi melakukan penagihan utang piutang.

Salah satu contoh konvensi ketatanegaraan yang menggeser ketentuan peraturan tertulis yaitu pernah terjadi ada tahun 1946, di mana UUD mengatur bahwa Menteri bertanggungjawab kepada Presiden, diubah menjadi bertanggungjawab kepada BP-KNIP. Contoh lainnya adalah, Pasal 534 KUHP (larangan mempertontonkan alat kontrasepsi) yang secara yuridis masih berlaku karena belum pernah dicabut, tetapi dalam praktiknya tidak lagi diterapkan, justru pemerintah melalui BKKBN justru membagi-bagi alat kontrasepsi.

Apakah dampak apabila konstitusi tidak dijadikan sebagai sumber dan pedoman, jawabannya ketidakteraturan.

Meskipun konstitusi tidak secara limitatif menyebutkan korupsi, tetapi pengaturan mengenai pembatasan kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada satu rumpun/org yang berpotensi disalahgunakan/korup, dll.

Hubungan konstitusi dengan Konvensi bahwa keduanya sama-sama merupakan sumber hukum. Keberadaan konvensi dibutuhkan sebagai salah satu sumber hukum, termasuk untuk menutupi kekurangan hukum tertulis yang lambat menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Konstitusi menjadi pedoman/acuan dalam penyelenggaraan negara yang tidak hanya mengikat pemerintah/aparatur pemerintah tetapi juga warga negara. Nah apakah kemudian ada yang tidak sesuai dengan

realitas, tentu itu dapat saja terjadi, apakah pemerintah yang tidak taat atau warga negara yang tidak taat.

Dalam proses internalisasi pendidikan, pembudayaan berkonstitusi kemudian dijadikan sebagai bagian tak terpisahkan baik dalam pemberian materi di dalam kelas maupun di luar kelas. Salah satu contoh yang bisa dilakukan, yakni melalui sosialisasi materi muatan yang terkandung dalam konstitusi. Dengan begitu, proses pembudayaan konstitusi dapat dilakukan sejak usia dini.

Selanjutnya, proses pembudayaan konstitusi bergeser dalam lingkup kelompok-kelompok sipil masyarakat, seperti lingkungan kerja, aktivitas keorganisasian, dan ikatan komunal kedaerahan melalui penciptaan komitmen terhadap antikorupsi yang bisa diekspresikan dalam banyak bentuk.

Harus diakui, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Namun, hal itu mutlak dilakukan dalam rangka mencapai cita-cita konstitusional negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

karena begini kan perubahan konstitusi kemarin menurut K.C Wheare ada 3 tahap yakni formal amandemen, constitutional convention, judicial interpretation. tentunya di dalamnya ada aturan mengenai korupsi. nah yang menjadi pertanyaan saya kemudian apakah penerapan aturan yg dimaksud sudah selaras dengan realita sekarang? mengingat kasus korupsi yang sangat merugikan negara itu sendiri

Secara teoritis fungsi konstitusi sudah ideal, tetapi apakah telah sesuai dgn realitas belum tentu, termasuk di Indonesia. ketidaksesuaian antara harapan dan realitas belum tentu menjadi kesalahan konstitusi, tetapi bisa jadi ada problem dalam penerapannya, misalnya integritas dari aparatur atau kebiasaan masyarakatnya.

Materi 6: Organ dan fungsi kekuasaan negara

□ Demokrasi Indonesia periode parlementer (1949-1959)

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949-1959.

Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar, yaitu:

1. Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950.

Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensiil menjadi quasi parlementer.

2. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.

Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949-1959, negara Indonesia menganut demokrasi parlementer.

Dalam perjalanannya DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang anggota-anggotanya dipilih langsung melalui pemilu ternyata di dalam konstitusi hanya diberi fungsi yang sangat sumir dan nyaris tidak berarti dibandingkan dengan biaya politik dan proses perekrutannya yang demokratis, DPD hanya diatur dalam dua pasal (pasal 22 C dan Pasal 22 D).

Adapun Upaya Penguatan Kapasitas Kelembagaan DPD RI yaitu DPD telah berupaya mengusulkan perubahan UUD khususnya pasal 22 D. Ini artinya diperlukan mengamandemen lagi UUD 1945. Hal ini dimungkinkan sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 1 UUD 1945. Usul itu tersebut dilandasi pertimbangan: Bahwa DPD RI memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih secara langsung oleh rakyat, karena itu seharusnya memiliki kewenangan formal yang tinggi.

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden cukup kuat. Hal ini karena presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak tidak mungkin dikerjakan sendiri. Sehingga memerlukan orang lain untuk membantunya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu wakil presiden, serta beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara.

Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan:

- ^ Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
- ^ Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- ^ Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- ^ Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.

Selain diatur UUD 1945, keberadaan kementerian negara juga diatur dalam sebuah undang-undang organik, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Undang-undang tersebut mengatur semua hal tentang kementerian negara, seperti:

- Kedudukan
- Tugas pokok
- Fungsi
- Susunan organisasi
- Pembentukan
- Pengubahan
- Penggabungan
- Pemisahan atau penggantian
- Pembubaran atau penghapusan kementrian
- Hubungan fungsional kementerian dengan •lembaga pemerintah non-kementerian dan pemerintah daerah
- Pengangkatan dan pemberhentian menteri

Sistem pemerintahan yang dipakai bangsa Indonesia adalah sistem presidensial.

Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu).

Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara.

Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

Menurut Konstitusi RIS, lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang presiden. Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih (Electoral College) yang terdiri atas utusan negara-negara bagian dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum menjalankan tugasnya, presiden bersumpah di hadapan Dewan Pemilih. Berbeda dengan UUD 1945, Konstitusi RIS mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih rinci. Selain itu dalam sistematika Konstitusi RIS, hal-hal yang mengatur tentang Lembaga Kepresidenan tidak terletak dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal.

Lembaga Kepresidenan dalam periode ini hanya berumur sangat pendek. RI dan RIS mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950 untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada 15 Agustus 1950, di hadapan sidang DPR dan Senat, diproklamasikan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia menggantikan negara federasi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (yang selanjutnya dikenal sebagai UUDS 1950) berdasarkan UU RIS No. 7 Tahun 1950. Pada hari itu juga, Pemangku Jabatan Presiden RI, Assaat, menyerahkan secara resmi kekuasaan pemerintahan RI kepada Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia.

Yang melatar belakangi mnculnya indenpenden mnurut saya oleh adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara yang ada dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan dan tujuan dilahirkannya Indenpenden itu sendiri untuk penyelesaian persoalan ketatanegaraan yang tidak dapat diselesaikan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudisial.

□ Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan.

Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden yang kedudukannya sebagai pembantu presiden di atas para menteri yang juga pengawas presiden.

Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua kamar di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD.

Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Jika dlm suatu pemerintah terdapat Perdana Menteri, maka dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer. Karena beradaan perdana menteri menjadi salah ciri utama sistem pemerintahan parlementer.

Keberadaan DPD memang sampai saat ini masih menimbulkan diskursus karena selain kewenangannya yang terbatas, kedudukannya juga masih abu-abu apakah sebagai senator (senator biasanya digunakan di negara-negara federal sementara di Indonesia menganut negara kesatuan) atau justru hanya co-legislator, dan secara kelembagaan apakah sebagai lembaga utama dalam rumpun legislatif atau justru hanya sebagai penunjang. Sehingga keberadaan DPD masih perlu dikaji untuk ditempatkan pada posisi yang tepat dalam sistem ketatanegaraan dengan tugas dan fungsi yang tepat pula.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen karena kedudukan presiden sejajar dengan parlemen (DPR), posisi masing-masing saling mengimbangi antara satu dengan lainnya.

Larangan rangkap jabatan dimaksudkan agar fungsi-fungsi setiap cabang kekuasaan dapat berjalan efektif. Jika terjadi rangkap jabatan, maka siapa yang akan mengawasi dan siapa yang akan diawasi. Misalnya seseorang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR dengan fungsi pengawasannya dan disisi lain juga menjabat sebagai menteri, dlm kondisi demikian fungsi pengawasan DPR tdk akan efektif.

Sebenarnya pejabat-pejabat di lingkungan yudikatif juga dipilih oleh rakyat, tetapi mekanismenya bukan pemilihan langsung seperti untuk memilih anggota DPR dan Presiden.

Lembaga-lembaga negara yang terbagi ke dalam tiga rumpun kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) ataupun lembaga negara diluar dari ketiga rumpun kekuasaan tersebut kedudukannya sederajat dan tidak ada yg subordinat khususnya setelah amandemen UUD. MPR, DPR, Presiden, MK dan MA kedudukannya sederajat, tidak ada yang lebih tinggi dan yang satu tidak bertanggungjawab kepada yg lainnya.

Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dalam bidang eksekutif. Sedangkan dalam posisi sebagai kepala negara seorang Presiden melaksanakan segala kewenangan termasuk urusan luar negeri .